



LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

**20
24**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Denpasar, Mei 2025
Kepala Loka Riset Perikanan Tuna,

Nyoman Siti Mardiani Satria, S. Akt
NIP. 19820903 200701 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Kejadian Penting Lainnya	43
VI. Lampiran dan Daftar	44

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Denpasar, Mei 2025
Kepala Loka Riset Perikanan Tuna,

N. Nyoman Siti Mardiani Satria, S. Akt
NIP. 19820903 200701 2 002

Laporan Keuangan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna periode 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 78.364.505 dari anggaran senilai Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 7.557.800.353 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 7.718.752.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 24.613.048.093 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 22.208.956. Aset Tetap (neto) sebesar Rp 24.590.839.137 dengan kewajiban senilai Rp 21.944.694 dan nilai ekuitas sebesar Rp 24.591.103.399.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp75.064.505, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.422.891.776 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.347.827.271. Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.764.876 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 5.352.592.147.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp22.467.483.198 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp5.352.592.147 dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp3.223.500 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.479.435.848 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp24.591.103.399.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR LOKA RISET PERIKANAN TUNA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam
Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
Pendapatan	B.1				
Pendapatan PNB		0	78.364.505,	0	21.625.713
Jumlah Pendapatan		0	78.364.505,	0	21.625.713
Belanja	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	1.537.647.000,	1.533.991.289,	100	936.235.437
Belanja Barang	B.4	3.084.859.000,	2.953.232.534,	96	1.841.327.321
Belanja Modal	B.5	3.096.246.000,	3.070.576.530,	99	-
Jumlah Belanja		7.718.752.000,	7.557.800.353,	98	2.777.562.758

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR LOKA RISET PERIKANAN TUNA
NERACA
PER 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.3	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	C.5	0	0
Persediaan	C.6	22.208.956,	25.082.953
Jumlah Aset Lancar		22.208.956,	25.082.953
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP / TGR	C.7	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.8	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.9	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.7	13.175.070.000,	13.175.070.000
Peralatan dan Mesin	C.8	12.256.950.589,	10.451.574.960
Gedung dan Bangunan	C.9	10.879.717.054,	9.803.394.601
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.10	264.996.920,	264.996.920
Aset Tetap Lainnya	C.11	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.12	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	(11.985.895.426,)	(11.251.304.840)
Jumlah Aset Tetap		24.590.839.137,	22.443.731.641
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.14	0	0
Aset Lain-Lain	C.15	0,	422.092.772
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.16	0,	(414.027.896)
Jumlah Aset Lainnya		0,	8.064.876
JUMLAH ASET		24.613.048.093,	22.476.879.470
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	21.944.694,	9.396.272
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.18	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.19	0	0
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.20	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		21.944.694,	9.396.272
JUMLAH KEWAJIBAN		21.944.694,	9.396.272
EKUITAS			
Ekuitas	C.21	24.591.103.399,	22.467.483.198
JUMLAH EKUITAS		24.591.103.399,	22.467.483.198
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.613.048.093	22.476.879.470

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR LOKA RISET PERIKANAN TUNA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		75.064.505,	1.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		75.064.505,	1.000.000
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai		1.537.501.689,	1.303.654.127
Beban Persediaan		50.819.997,	16.185.299
Beban Barang dan Jasa		1.506.402.463,	1.580.784.622
Beban Pemeliharaan		1.258.819.906,	1.231.969.635
Beban Perjalanan Dinas		149.102.187,	249.223.385
Beban Penyusutan dan Amortisasi		920.245.534,	919.749.279
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih		0,	(109)
JUMLAH BEBAN		(5.422.891.776,)	5.301.566.238
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		5.347.827.271,	(5.300.566.238)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3		
Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(4.764.876,)	82.052.150
Surplus / Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	(65.088.121)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(4.764.876)	16.964.029
POS LUAR BIASA	D.4		0
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) - LO		5.352.592.147,	(5.283.602.209)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR LOKA RISET PERIKANAN TUNA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	22.467.483.198,	22.615.448.897
SURPLUS (DEFISIT) - LO	E.2	(5.352.592.147,)	(5.283.602.209)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E.3	(3.223.500,)	492.232.450
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nilai Persediaan		0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi		0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(3.223.500,)	492.232.450
Koreksi Lain-Lain		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	7.479.435.848,	4.643.404.060
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS	E.5	2.123.620.201,	(147.965.699)
EKUITAS AKHIR	E.6	24.591.103.399,	22.467.482.198

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) yang sebelumnya bernama Stasiun Monitoring Perikanan Tuna (SMPT) Benoa awalnya merupakan sebuah proyek kerjasama dimana inisiasi pertama pada tahun 1992 bekerjasama dengan Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Australia yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya tekanan aktivitas perikanan terhadap fishing ground tuna sirip biru selatan. Kerjasama berlanjut pada tahun 2002 dengan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan Overseas Fishery Cooperation Foundation (OFCF) Jepang yang bertujuan untuk mencatat dan memonitoring tuna yang didaratkan di Benoa sebagai salah satu tempat pendaratan utama selain Cilacap dan Muara Baru. Pada perkembangannya komoditas yang dicatat juga mencakup tuna-like species seperti marlin (billfish) dan hasil tangkap sampingan (by-catch).

Pada tahun 2005 trial observer program dilaksanakan atas kerjasama Australian Centre for Agricultural Research (ACIAR) dan CSIRO dan berakhir tahun 2009. Pada tahun 2009 SMPT Benoa berdiri yang terintegrasi dengan Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan (P4KSI) dan tahun 2010 di bawah tanggung jawab Balai Penelitian Perikanan Laut (BPPL). kemudian pada tahun 2011 berdiri sendiri menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) mandiri di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.27/MEN/2010. Pada tanggal 8 Maret 2011, operasional perkantoran LPPT secara resmi dibuka oleh Kepala Balitbang KP. Pada tahun 2017, terdapat perubahan nomenklatur Loka Penelitian Perikanan Tuna (LPPT) menjadi Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 16/Permen-KP/2017 tentang organisasi dan tata kerja LRPT tanggal 27 Mei 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset sumber daya perikanan tuna dan

sejenisnya (tuna like species). yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. Loka Riset Perikanan Tuna mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sumber Daya perikanan tuna dan sejenisnya (tuna like species) di wilayah Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Loka Riset Perikanan Tuna menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset perikanan tuna;
- b. pelaksanaan kegiatan riset sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (tuna like species) di wilayah Negara Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia yang meliputi aspek biologi, lingkungan, dinamika populasi, dan eksploitasi;
- c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Loka Riset Perikanan Tuna dipimpin oleh seorang Kepala. dengan struktur organisasi Loka Riset Perikanan Tuna terdiri dari:

- Urusan Umum : mempunyai tugas melakukan penyusunan. pemantauan. dan evaluasi rencana. program. dan anggaran. pelaporan. urusan keuangan. hubungan masyarakat. organisasi dan tata laksana. kepegawaian. persuratan. kearsipan. dokumentasi. rumah tangga. serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-

masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Riset Perikanan Tuna.

Adapun struktur organisasi dan pejabat struktural yang duduk dalam organisasi Loka Riset Perikanan Tuna terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Loka Riset Perikanan Tuna sebagai berikut:



Struktur Organisasi Loka Riset Perikanan Tuna

Visi dan Misi Loka Riset Perikanan Tuna:

Loka Riset Perikanan Tuna mempunyai visi "Menjadi Institusi Utama Penyedia Data dan Informasi Perikanan Tuna dan sejenisnya (*tuna like species*) di wilayah Negara Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia"

Pada Tahun 2024, LRPT memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja LRPT Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan

pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan. yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut. telah ditetapkan misi Loka Riset Perikanan Tuna Benoa yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan data dan informasi terkini hasil penelitian perikanan tuna.

Mengembangkan profesionalisme kelembagaan dan sumberdaya penelitian perikanan tuna

1.1. Keragaan SDM (Kekuatan SDM)

Pada Tahun 2024 Loka Riset Perikanan Tuna mempunyai total pegawai sebanyak 10 orang PNS dan 1 orang PPPK. Untuk mengoptimalkan kinerja Loka Riset Perikanan Tuna dengan sumberdaya manusia yang terbatas, pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil dibantu oleh 7 orang PPNPN. sehingga total jumlah pegawai LRPT baik ASN maupun PPNPN pada Tahun 2024 menjadi 18 orang. Komposisi pegawai di Loka Riset Perikanan Tuna adalah sebagai berikut.

- Jumlah pegawai berdasarkan golongan
Komposisi jumlah PNS LRPT berdasarkan golongan/ruang per Tahun 2024 terdiri atas Golongan III sebanyak 9 orang dan Golongan II sebanyak 1 orang.
- Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan
Jumlah PNS LRPT Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari jenjang S2 sebanyak 2 orang. S1 sebanyak 5 orang. D3 sebanyak 2 orang dan SLTA sebanyak 1 orang.
- Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional
Komposisi jumlah PNS LRPT Semester I 2024 berdasarkan jabatan fungsionalnya terdiri atas jabatan fungsional sebanyak 5 orang. fungsional umum/pelaksana sebanyak 4 orang dan struktural sebanyak 1 orang.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI disusun berdasarkan penginputan melalui aplikasi SAKTI beserta monitoringnya pada MONSAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan -LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan -LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

*Aset
Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Loka Riset Perikanan Tuna terdapat enam kali revisi yang terdiri dari empat revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dan dua kali revisi POK Satker. Berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH DIREVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	1.777.647.000	1.537.647.000,
Belanja Barang	3.034.859.000	3.084.859.000,
Belanja Modal	1.800.000.000	3.096.246.000,
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	6.612.506.000	7.718.752.000

Pada periode 31 Desember 2024 LRPT melaksanakan 25 (Dua Puluh Lima) kali revisi DIPA. Terdiri dari 11 (Sebelas) kali Revisi DIPA Petikan terkait perihal Blokir Auto Adjustment (AA) sebesar Rp. 119.000.000,- dari kegiatan Dukungan Managerial; terkait Pemutakhiran Hal III DIPA TW I; terkait Pemutakhiran Hal III DIPA TW II; Penambahan Anggaran Belanja Modal (53) Rp. 1.296.246.000,-, Pemutakhiran Hal III DIPA TW III, Pemutakhiran Hal III DIPA TW IV, Penambahan Anggaran pada Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat sebesar Rp. 50.000.000,-, Optimalisasi sisa Belanja Pegawai (Rev DJA) sebesar Rp. 240.000.000,-, Revisi Pemutakhiran Kewenangan KPA, Pergeseran anggaran pada Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) terkait pemenuhan Belanja langganan daya dan jasa pada langganan listrik, melalui revisi Kewenangan KPA, dan pemenuhan Pagu Minus pada Anggaran Belanja Pegawai (001), melalui revisi Kewenangan KPA. Adapun revisi POK satker sebanyak 13 (Tiga Belas) kali dengan rincian Revisi POK pada Belanja Pegawai memunculkan Akun Belanja Pegawai PPPK; Revisi POK Operasional Perkantoran (002) penyesuaian detail pada belanja keperluan sehari-hari perkantoran untuk penyesuaian biaya tenaga keamanan dan pengemudi; Revisi POK Operasional Perkantoran (002) penyesuaian detail pada belanja keperluan sehari-hari perkantoran untuk penyesuaian biaya Tenaga PJLP; Revisi POK Operasional Perkantoran (002) penyesuaian detail pada belanja

keperluan sehari-hari perkantoran untuk penyesuaian biaya belanja barang operasional lainnya berupa belanja pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh BALI; Revisi POK Penyesuaian detail pada Belanja Modal (53); Revisi POK Penyesuaian detail pada Belanja Modal (53); Revisi POK Operasional Perkantoran (002) penyesuaian detail pada belanja keperluan sehari-hari perkantoran, Belanja Modal (53) penyesuaian detail Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Layanan Sarana Internal, serta Belanja Modal (53) penyesuaian detail Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Layanan Sarana Internal, serta Pergeseran Anggaran pada Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002).

Tabel . Revisi DIPA Petikan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tanggal DIPA	Total PAGU (Rp)	Total Blokir (Rp)	Kode Digital Stamp	Kategori Revisi	Keterangan Revisi
1	DIPA Petikan AWAL (4038 26)	24 November 2023	6.612.506.000	-	DS:0790-1669-0181-4769	-	DIPA BASELINE 2024
2	POK SATKER- 1	15 Desember 2024	6.612.506.000	-	-	-	Revisi POK pada Belanja Pegawai memunculkan Akun Belanja Pegawai PPPK
3	POK SATKER- 2	29 Desember 2024	6.612.506.000	-	-	-	Revisi POK Operasional Perkantoran (002) penyesuaian detail pada belanja keperluan sehari-hari perkantoran untuk penyesuaian biaya tenaga keamanan dan pengemudi
4	POK SATKER- 3	3 Januari 2024	6.612.506.000	-	-	-	Revisi POK Operasional Perkantoran (002) penyesuaian detail pada belanja keperluan sehari-hari perkantoran untuk penyesuaian biaya Tenaga PJLP
5	POK SATKER- 4	16 Januari 2024	6.612.506.000	-	-	-	Revisi POK Operasional Perkantoran (002) penyesuaian detail pada belanja keperluan sehari-hari perkantoran untuk penyesuaian biaya belanja barang operasional lainnya berupa belanja pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh BALI
6	DIPA Petikan REV 1 (4038 26)	29 Januari 2024	6.612.506.000	119.000.000	DS:3914-0022-7539-8135	-	DIPA Revisi -1 terkait prihal Blokir Auto Adjustment (AA) sebesar Rp. 119.000.000,- dari kegiatan Dukungan Managerial
7	DIPA Petikan	15 Februari	6.612.506.000	119.000.000	DS:3914-0022-	-	DIPA Revisi -2 terkait Pemutakhiran Hal III DIPA

	n REV 2 (4038 26)	2024			7539-8135		TW I
8	DIPA Petika n REV 3 (4038 26)	4 April 2024	6.612.506.000	119.000.000	DS:3914-0022-7539-8135		DIPA Revisi -3 terkait Pemutakhiran Hal III DIPA TW II
9	POK SATKER- 5	7 Mei 2024	6.612.506.000	119.000.000	-	-	Revisi POK Penyesuaian detail pada Belanja Modal (53)
10	POK SATKER- 6	7 Mei 2024	6.612.506.000	119.000.000	-	-	Revisi POK Penyesuaian detail pada Belanja Modal (53)
11	DIPA Petika n REV 4 (4038 26)	7 Juni 2024	7.908.752.000	119.000.000	DS: 3134-3890-0742-4099		DIPA Revisi -4 terkait Penambahan Anggaran Belanja Modal (53) Rp. 1.296.246.000,-
12	POK SATKER- 7	10 Juni 2024	7.908.752.000	119.000.000	-	-	Revisi POK Operasional Perkantoran (002) penyesuaian detail pada belanja keperluan sehari-hari perkantoran
13	DIPA Petika n REV 5 (4038 26)	15 Juli 2024	7.908.752.000	119.000.000	DS: 3134-3890-0742-4099		DIPA Revisi -5 terkait Pemutakhiran Hal III DIPA TW III
14	POK SATKER- 8	29 Juli 2024	7.908.752.000	119.000.000	-	-	Revisi POK Belanja Modal (53) penyesuaian detail Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Layanan Sarana Internal
15	POK SATKER- 9	20 September 2024	7.908.752.000	119.000.000	-	-	Revisi POK Belanja Modal (53) penyesuaian detail Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Layanan Sarana Internal serta Pergeseran Anggaran pada Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)
16	DIPA Petika n REV 6 (4038 26)	15 Oktober 2024	7.908.752.000	119.000.000	DS: 3134-3890-0742-4099	-	DIPA Revisi -6 terkait Pemutakhiran Hal III DIPA TW IV
17	DIPA Petika n REV 7 (4038 26)	31 Oktober 2024	7.958.752.000	119.000.000	DS: 4298-2745-3820-4356	-	DIPA Revisi -7 terkait Penambahan Anggaran pada Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat sebesar Rp. 50.000.000,-
18	DIPA Petika n REV 8 (4038 26)	5 November 2024	7.718.752.000	119.000.000	DS: 0739-8000-8010-2400	-	DIPA Revisi -8 terkait Optimalisasi sisa Belanja Pegawai (Rev DJA) sebesar Rp. 240.000.000,-
19	POK SATKER-	15 November 2024			-	-	Revisi POK Belanja Modal (53) penyesuaian detail Belanja Modal

	10		7.718.752.000	119.000.000			Peralatan dan Mesin pada Layanan Sarana Internal serta Pergeseran Anggaran pada Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)
20	POK SATK ER-11	20 November 2024	7.718.752.000	119.000.000	-	-	Revisi POK Belanja Modal (53) penyesuaian detail Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Layanan Sarana Internal serta Pergeseran Anggaran pada Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)
21	POK SATK ER-12	22 November 2024	7.718.752.000	119.000.000	-	-	Revisi POK Belanja Modal (53) penyesuaian detail Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Layanan Sarana Internal serta Pergeseran Anggaran pada Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)
23	POK SATK ER-13	28 November 2024	7.718.752.000	119.000.000	-	-	Revisi POK Belanja Modal (53) penyesuaian detail Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Layanan Sarana Internal serta Pergeseran Anggaran pada Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)
24	DIPA Petikan REV 9 (4038 26)	3 Desember 2024	7.718.752.000	119.000.000	DS: 0739-8000-8010-2400	-	DIPA Revisi -9 Revisi Pemutakhiran Kewenangan KPA
25	DIPA Petikan REV 10 (4038 26)	9 Desember 2024	7.718.752.000	119.000.000	DS: 0739-8000-8010-2400	-	DIPA Revisi -10 Revisi Pergeseran anggaran pada Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) terkait pemenuhan Belanja langganan daya dan jasa pada langganan listrik, melalui revisi Kewenangan KPA
26	DIPA Petikan REV 11 (4038 26)	31 Desember 2024	7.718.752.000	119.000.000	DS: 0739-8000-8010-2400	-	DIPA Revisi -11 Revisi pemenuhan Pagu Minus pada Anggaran Belanja Pegawai (001), melalui revisi Kewenangan KPA

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp78.364.505

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp78.364.505. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp. 3.300.000, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp. 9.740.000, dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp. 65.324.505.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	% Naik (Turun)
Pendapatan			
Pendapatan PNB	78.364.505,	95.977.864,	-57,18
Jumlah	78.364.505,	95.977.864,	-57,18

B.2 Belanja

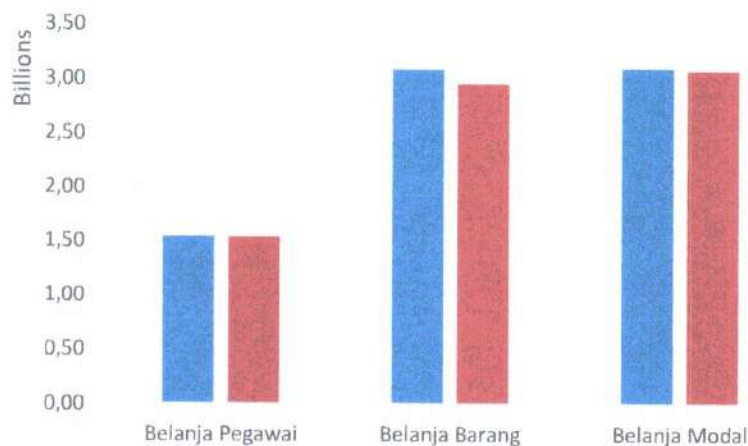
Realisasi
Belanja
Negara Rp
7.557.800.353

Realisasi Belanja instansi pada periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 7.557.800.353 atau 97,91% dari anggaran belanja sebesar Rp 7.718.752.000. Angka ini termasuk dengan pagu blokir sebesar Rp 119.000.000,-. Adapun realisasi tanpa blokir mencapai 99,45%. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2024

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	1.537.647.000,	1.533.991.289,	100
Belanja Barang	3.084.859.000,	2.953.232.534,	96
Belanja Modal	3.096.246.000,	3.070.576.530,	99
Total Belanja Kotor	7.718.752.000,	7.557.800.353,	98
Pengembalian			
Jumlah	7.718.752.000,	7.557.800.353,	98

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan periode 2023, Realisasi Belanja sampai dengan periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 51,85 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	% Naik (Turun)
Belanja Pegawai	1.533.991.289,	1.301.604.492	17,85
Belanja Barang	2.953.232.534,	3.086.337.432	-4,31
Belanja Modal	3.070.576.530,	334.265.000	818,61
Belanja Bantuan Sosial		-	
Jumlah	7.557.800.353,	4.722.206.924	60,05

B.3 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai Rp
1.533.991.289

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.533,991,289 dan Rp 1.301.604.492 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	% Naik (Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	746.740.110	695.778.972	7,32
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	60.853.062	8.309.304	632,35
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	-	-	
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	-	-	
Belanja Lembur	-	-	
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	726.407.947	598.597.016	21,35
Jumlah Belanja Kotor	1.533.991,289	1.302.685.292	
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji	0	1.080.800	-100,00
Jumlah Belanja	1.533.991,289	1.301.604.492	17,85

B.4 Belanja Barang

Belanja
Barang Rp
2.953.232.5
34

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.953.232.534 dan Rp 3.086.337.432. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 28,80 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena kegiatan riset dan operasional perkantoran sudah dapat dilaksanakan pada awal periode anggaran.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	1.033.644.031	1.147.346.582	-9,91
Belanja Barang Non Operasional	19.183.483	35.590.600	-46,10
Belanja Barang Persediaan	47.946.000	25.040.888	91,47
Belanja Jasa	444.536.927	397.334.342	11,88
Belanja Pemeliharaan	1.258.819.906	1.231.969.635	2,18
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	149.102.187	249.223.385	-40,17
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	-	-	
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	2.953.232.534	3.086.505.432	-4,32
Pengembalian Belanja	0	168.000	-100,00
Jumlah Belanja	2.953.232.534	3.086.337.432	-4,31

B.5 Belanja Modal

Belanja
Modal
Rp3.070.576.530

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.070.576.530,- dan Rp334.265.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun anggaran 2024 Loka Riset Perikanan Tuna tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal.

Perbandingan Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	% Naik (Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.492.151.530	334.265.000	346,4
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.578.425.000	0	
Jumlah Belanja Kotor	3,070,576,530	334.265.000	818,61
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja	3,070,576,530	334.265.000	818,61

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2024 dan 2023

KETERANGAN	TA 2024	TA 2023
Uang Tunai	0	0
Uang Yang Belum Di GU	0	0
Uang Di Rekening Bank (BNI)	0	0
Selisih kas	0	
JUMLAH	0	0

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 dan masing-masing adalah senilai Rp0 dan Rp0.

C.3 Persediaan

Persediaan
Rp22.208.956

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp22.208.956 dan Rp25.082.953. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun pada Satker Loka Riset Perikanan Tuna barang persediaan terbagi menjadi tiga kelompok bidang yaitu Barang Konsumsi dalam bentuk alat tulis, buku tulis, odner, map, staples, isi staples, tinta printer, mouse dan lainnya, sedangkan baarang persediaan suku cadang dalam bentuk suku cadang alat laboratorium dan barang konsumsi bahan baku dalam bentuk bahan kimia cair dan padat . Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

JENIS	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi	22.208.956	25.082.953
Suku Cadang	0	0
Bahan Baku	0	0
JUMLAH	22.208.956	25.082.953

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.4 Tanah

Tanah

Rp13.175.070.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.175.070.000 dan Rp13.175.070.000. Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna memiliki tanah yang terletak di Jalan Mertasari No. 140, Br. Suwung Kangin, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan – Bali sesuai dengan sertifikat hak pakai tanah nomor : 22.03.03.09.4.00063 seluas 1.900 m2 dan sertifikat hak pakai tanah nomor : 22.09.03.09.4.00064 seluas 149 m2. Adapun sampai dengan periode ini tidak terjadi transaksi mutasi tambah ataupun mutasi kurang. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023

31 Desember 2024	30 Desember 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
Rp13.175.070.000	Rp13.175.070.000	0
Mutasi / perubahan tanah tsb adalah		0

Tidak terdapat perubahan nilai aset tanah pada Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna pada periode 31 Desember 2024.

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin

Rp

12.256.950.589

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp 12.256.950.589 dan Rp 10.451.574.960 . Sampai dengan periode 31 Desember ini terjadi mutasi tambah pada kelompok peralatan mesin senilai Rp 498.879.047 yang berasal dari pembelian intrakompitabel, sedangkan untuk mutasi kurang berasal senilai Rp 185.654.948 berupa transfer keluar ke satker PSDKP Benoa dan BPSPL Denpasar. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	10.451.574.960
Mutasi Tambah	
Pembelian	1.492.151.530
Reklas Masuk	498.879.047
Transfer Masuk	
Mutasi Kurang	
Aset Tetap yg tdk digunakan	
Transfer keluar	185.654.948
Saldo per 31 Desember 2024	
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(9.713.732.493)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	12.192.175.583

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp10.879.717.054
4

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp10.879.717.054 dan Rp 9.803.394.601. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	9.803.394.601
Mutasi Tambah	
Penambahan Nilai (kapitalisasi)	1.578.425.000
Mutasi Kurang	
Reklas Keluar	502.102.547
Saldo per 31 Desember 2024	
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(2.170.580.782)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	10.879.717.054

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp264.996.920

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tidak terdapat perubahan nilai aset tanah pada Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna pada periode 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp264.996.920 dan Rp264.996.920. adapun sampai dengan periode 31 Desember 2024 tidak terjadi mutasi kurang dan mutasi tambah pada kelompok gedung dan bangunan. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	264.996.920
Mutasi Tambah	
Penambahan Jaringan Teknologi Informasi	0
Reklas Masuk	0
Mutasi Kurang	
Reklas Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2024	
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	101.582.151
Nilai Buku per 31 Desember 2024	264.996.920

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
pengerjaan Rp0

Konstruksi dalam pengerjaan pada kegiatan belanja penambahan nilai gedung dan bangunan senilai Rp 0.

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap (Rp
11.985.895.426)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing (Rp11.985.895.426) dan (Rp11.251.304.840). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	13.175.070.000	0	13.175.070.000
2	Gedung dan Bangunan	12,256,950,589	9,713,732,493	10.198.215.908
3	Peralatan dan Mesin	10.879.717.054	2,170,580,782	1.578.974.767
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	264.996.920	101,582,151	167.831.384
Jumlah		36.576.734.563	(11.985.895.426)	22.011.128.462

C.9 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp0

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah senilai Rp0 dan Rp422.092.772. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	422.092.772
Mutasi Tambah	-
Penghentian Aset	-
Mutasi Kurang	-
Penghapusan BMN	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

C.10 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN
Rp0

Nilai Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang pihak ke-3
Rp21.944.694

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada pihak Ketiga senilai Rp21.944.694 pada periode Desember 2024 dan 9.396.272 untuk tahun 2023. Utang kepada pihak ketiga ini berupa Tunjangan Kinerja PPPK Bulan Desember 2024 untuk 1 orang senilai Rp.3.510.400, Tagihan listrik bulan Desember senilai Rp.18.167.779, Tagihan telepon bulan Desember senilai Rp.110.390, dan Tagihan air bulan Desember senilai Rp. 156.125. Utang kepada pihak ketiga akan dibayarkan pada bulan Januari 2025.

C.13 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum
ditagihkan Rp.0

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga, berarti bahwa transaksi belanja yang telah diinput pada menu komitmen namun belum terbit SPBY pada periode penerbitan.

C.14 Ekuitas

Ekuitas
Rp24.591.103.39
9

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp Rp24.591.103.399 dan Rp22.476.879.470. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp75.064.505

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp75.064.505 dan Rp1.000.000. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp. 3.300.000 (disetorkan oleh KPPN), Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp. 9.740.000, dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp. 65.324.505:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
Pendapatan			
Pendapatan PNB lainnya	75.064.505	1.000.000	7.406
Jumlah	75.064.505	1.000.000	7.406

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp
1.537.501.689

Jumlah Beban Pegawai periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.537.501.689 dan Rp 1.303.654.127. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	2024	2023	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	525.170.200,	476.925.200	10,12
Beban Pembulatan Gaji PNS	7.482,	7.229	-1,37
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	41.841.790,	43.021.900	-2,74
Beban Tunj. Anak PNS	15.032.084,	12.411.054	21,12
Beban Tunj. Struktural PNS	7.560.000,	6.480.000	16,67
Beban Tunj. Fungsional PNS	34.720.000,	37.420.000	-7,22
Beban Tunj. PPh PNS	2.913.394,	276.150	955,00
Beban Tunj Beras PNS	32.444.160,	32.082.060	1,13
Beban Uang Makan PNS	76.746.000,	74.860.000	2,52
Beban Tunj. Umum PNS	10.305.000,	11.215.000	-8,11
Beban Gaji Pokok PPPK	40.023.200,	5.294.400	655,95
Beban Pembulatan Gaji PPPK	438,	56	682,14
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.002.320,	529.440	655,95
Beban Tunjangan Anak PPPK	800.464,	105.888	655,95
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000,	720.000	600,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	3.041.640,	434.520	600,00
Beban Uang Makan PPPK	7.945.000,	1.225.000	548,57
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus / Kegiatan) PNS	680.173.627,	593.644.386	14,57
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus / Kegiatan) PPPK	46.235.320,	7.001.844	610,47
Jumlah Belanja	1.537.501.689	1.303.654.127	17,67
Kekurangan Gaji Pegawai TA yg Lalu	0	0	0
Jumlah Belanja Bersih	1.537.501.689	1.303.654.127	17,67

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp 50.819.997

Jumlah Beban Persediaan pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 50.819.997 dan Rp 16.185.299. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Terjadi peningkatan belanja barang persediaan jika dibandingkan dengan belanja barang persediaan pada periode 31 Desember 2023.

Uraian Jenis Beban	2024	2023	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	50.819.997	16.185.299	213,99
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja	50.819.997	16.185.299	213,99

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp1.506.402.463

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.506.402.463 dan Rp 1.580.784.622. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	2024	2023	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	948.272.036,	1.015.338.489	-6,61
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.119.932,	6.211.634	-49,77
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	53.448.000,	873.708	6017,38
Beban Barang Operasional Lainnya	28.804.063,	78.036.000	-63,09
Beban Bahan	11.103.875,	46.718.751	-76,23
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	8.079.608,	7.351.000	9,91
Beban Langganan Listrik	128.347.544,	8.160.000	1472,89
Beban Langganan Telepon	1.408.954,	20.079.600	-92,98
Beban Langganan Air	1.873.500,	105.464.776	-98,22
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	270.000.000,	1.564.890	17153,61
Beban Sewa	5.994.000,	1.888.500	217,39
Beban Jasa Lainnya	45.950.951,	270.000.000	-82,98
Jumlah Belanja	1.506.402.463	1.580.784.622	-5,87

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp 1.258.819.906

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp 1.258.813.906 dan Rp 1.231.969.635. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Terjadi peningkatan beban pemeliharaan jika dibandingkan dengan beban pemeliharaan pada periode Juni 2023. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	2024	2023	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	940.867.000,	1.034.841.000	-9,08
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	312.008.726,	183.787.181	69,77
Beban Pemeliharaan lainnya	5.944.180,	13.341.454	-55,45
Jumlah Belanja	1.258.813.906	1.231.969.635	2,18

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas Rp
149.102.187

Beban Perjalanan Dinas Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 149.102.187 dan Rp 249.223.385. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Terjadi penurunan beban perjalanan dinas jika dibandingkan dengan beban perjalanan dinas pada periode September 2023 hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan persiapan dalam rangka perubahan kelembagaan Loka Riset Perikanan Tuna ditahun 2023. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	2024	2023	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	148.987.187	242.603.385	-38,59
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.000	-	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		6.620.000	-100,00
Jumlah Belanja	149.102.187	249.223.385	-40,17

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp920.245.534*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 920.245.534 dan Rp 919.749.279. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	2024	2023	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	701.519.108	714.342.730	-59,61
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	209.893.196	196.094.190	-50,00
Beban Penyusutan Jaringan	8.833.230	8.833.230	-50,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	479.129	-100,00
Jumlah Belanja	920.245.534	919.749.279	-57,49

D.8 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp4.764.876

Pos Surplus/Devisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	2024	2023	% Naik (Turun)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(4.764.876)	82.052.150,	(128)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(65.088.121)	
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(4.764,876)	16.964.029,	(128)

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

D.10 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO
(Rp5.352.592.147)

Surplus/defisit LO merupakan hasil akhir dari Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan non operasional ditambahkan dengan pos luar biasa. Surplus/defisit - LO untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp5.352.592.147 dan Rp5.283.602.209.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp22,467,483,198*

Nilai ekuitas pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22,467,483,198 dan Rp22,615,448,897 .

E.2 Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO
Rp(5.352.592.147)*

Jumlah Defisit LO untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(5,352,592,147) dan Rp(5,283,602,209). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi atas reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan yang terjadi pada periode sebelumnya.

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp3.223.500*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.223.500 dan 492,232,450.

Transaksi Antar
Entitas
Rp7.479.435.848

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 7,479,435,848 dan Rp 4,643,404,060. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.557.800.353,
Diterima dari Entitas Lain	-78.364.505,
Jumlah	7.479.435.848,

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp78.364.505) sedangkan DKEL sebesar Rp7.557.800.353.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp24.591.103.399

Nilai Ekuitas pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 24,591,103,399 dan Rp 22,467,483,198.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada catatan kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT

-

F.2.2 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

-

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN LAIN

- LRPT Benoa pada tahun anggaran 2024 terdapat Belanja yang masih harus dibayar (Akrual) dan telah dilakukan penjumlahan, yakni belanja Listrik senilai Rp.18.167.779,-, Belanja Air senilai Rp.156.125, Belanja Telepon senilai Rp.110.390,-, serta Belanja pegawai tunjangan kinerja PPPK senilai Rp.3.510.400,-.
- Capaian Output Realisasi Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna per 31 Desember 2024 mencapai 97,91% pada realisasi belanja. Angka ini termasuk dengan pagu blokir sebesar Rp 119.000.000,-. Adapun realisasi tanpa blokir mencapai 99,45%. Sedangkan realisasi output hingga bulan Desember 2024 sebesar 100% terhadap Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Rincian capaian terdapat pada lampiran Laporan Realisasi Kinerja
- LRPT Benoa pada tahun 2024 telah menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan 4 Akun signifikan, antara lain Akun : 111611 - Kas di Bendahara Pengeluaran; 117111 - Barang Konsumsi; 132111 - Peralatan dan Mesin; dan 533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12

SATUAN KERJA : LOKA RISET PERIKANAN TUNA 403826

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 7:54 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	78,364,505	78,364,505	0	0	95,977,864	95,977,864	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	78,364,505	78,364,505	0	0	95,977,864	95,977,864	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	78,364,505	78,364,505	0	0	95,977,864	95,977,864	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	7,718,752,000	7,557,800,353	(160,951,647)	97.91	4,764,171,000	4,722,206,924	(41,964,076)	99.12
1. Belanja Pegawai	1,537,647,000	1,533,991,289	(3,655,711)	99.76	1,309,486,000	1,301,604,492	(7,881,508)	99.4
2. Belanja Barang	3,084,859,000	2,953,232,534	(131,626,466)	95.73	3,119,685,000	3,086,337,432	(33,347,568)	98.93
3. Belanja Modal	3,096,246,000	3,070,576,530	(25,669,470)	99.17	335,000,000	334,265,000	(735,000)	99.78
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : LOKA RISET PERIKANAN TUNA 403826

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 7:54 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	7,718,752,000	7,557,800,353	(160,951,647)	97.91	4,764,171,000	4,722,206,924	(41,964,076)	99.12
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Dipaparkan 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA Satuan Kerja
LOKA RISET
PERIKANAN TUNA
MAYORAN SITI MARDIANI SATRIA
116098209032007012002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 05/05/25 12:28 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 7:55 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	7,557,800,353
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	78,364,505	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,300,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	9,740,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	65,324,505
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	525,170,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7,482	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	41,841,790	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,032,084	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	34,720,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,913,394	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	32,444,160	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	76,746,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,305,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40,023,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	438	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,002,320	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	800,464	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,040,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,041,640	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	7,945,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	680,172,627	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	46,235,320	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	948,272,036	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,119,932	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	53,448,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	28,804,063	0
3.0	521211	Belanja Bahan	11,103,875	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	8,079,608	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	47,946,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	119,264,356	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,439,120	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,888,500	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	270,000,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	5,994,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	45,950,951	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	940,867,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 05/05/25 12:28 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 7:55 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	312,008,726	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	5,944,180	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	148,987,187	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	115,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,492,151,530	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,578,425,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	352
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	9,478
JUMLAH			7,636,174,688	7,636,174,688

Keterangan :
FINAL

Depasat, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA Satuan Kerja
LOKA RISET PERIKANAN TUNA
NYOMAN SITI MARDIANI SATRIA
198209032007012002



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 7:55 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	22,208,956	0
0.0	131111	Tanah	13,175,070,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,256,950,589	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,879,717,054	0
0.0	134113	Jaringan	264,996,920	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,713,732,493
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,170,580,782
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	101,582,151
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	3,510,400
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	18,434,294
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,557,800,353
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	78,364,505	0
0.0	391111	Ekuitas	0	22,467,483,198
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3,223,500	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,300,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	9,740,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	65,324,505
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	525,170,200	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	7,130	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	41,841,790	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	15,032,084	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	34,720,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,913,394	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	32,444,160	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	76,746,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,305,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	40,023,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	438	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,002,320	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	800,464	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5,040,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	3,041,640	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	7,945,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	680,163,149	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	49,745,720	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	948,272,036	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,119,932	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 7:55 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	53,448,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	28,804,063	0
3.0	521211	Beban Bahan	11,103,875	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	8,079,608	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	128,347,544	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,408,954	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,873,500	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	270,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	5,994,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	45,950,951	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	940,867,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	312,008,726	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	5,944,180	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	148,987,187	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	115,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	701,519,108	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	209,893,196	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	8,833,230	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	50,819,997	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	8,064,876	0
JUMLAH			42,111,488,176	42,111,488,176

Keterangan :
FINAL

Depdiknas, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA Satuan Kerja
LOKA RISET
PERIKANAN TUNA
NYOMAN SITI MARDIANI SATRIA
NIP. 198209032007012002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 7:52 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	75,064,505	1,000,000	74,064,505	7,406.45
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	75,064,505	1,000,000	74,064,505	7,406.45
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	75,064,505	1,000,000	74,064,505	7,406.45
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,537,501,689	1,303,654,127	233,847,562	17.938
Beban Persediaan	50,819,997	16,185,299	34,634,698	213.989
Beban Barang dan Jasa	1,506,402,463	1,580,784,622	(74,382,159)	(4.705)
Beban Pemeliharaan	1,258,819,906	1,231,969,635	26,850,271	2.179
Beban Perjalanan Dinas	149,102,187	249,223,385	(100,121,198)	(40.173)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 7:52 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	920,245,534	919,749,279	496,255	0.054
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(109)	109	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,422,891,776	5,301,566,238	121,325,538	2.288
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,347,827,271)	(5,300,566,238)	(47,261,033)	0.892
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(4,764,876)	82,052,150	(86,817,026)	(105.807)
Pendapatan Pelepasan Aset	3,300,000	82,052,150	(78,752,150)	(95.978)
Beban Pelepasan Aset	8,064,876	0	8,064,876	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(65,088,121)	65,088,121	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	12,925,714	(12,925,714)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	78,013,835	(78,013,835)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(4,764,876)	16,964,029	(21,728,905)	(128.088)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,352,592,147)	(5,283,602,209)	(68,989,938)	1.306
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,352,592,147)	(5,283,602,209)	(68,989,938)	1.306

Keterangan :
FINAL



Dipaparkan, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA Satuan Kerja

NI NYOMAN SITI MARDIANI SATRIA
III 6 198209032007012002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 05/05/25 12:28 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 7:54 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	22,467,483,198	22,615,448,897	(147,965,699)	(0.65)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,352,592,147)	(5,283,602,209)	(68,989,938)	1.31
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(3,223,500)	492,232,450	(495,455,950)	(100.65)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(3,223,500)	492,232,450	(495,455,950)	(100.65)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,479,435,848	4,643,404,060	2,836,031,788	61.08
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,123,620,201	(147,965,699)	2,271,585,900	(1,535.21)
EKUITAS AKHIR	24,591,103,399	22,467,483,198	2,123,620,201	9.45

Keterangan :

FINAL



Denpasar, 05 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA Satuan Kerja

LOKA RISET
PERIKANAN TUNA

NYOMAN STI MARDIANI SATRIA

Idc 198209032007012002